

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara dengan aparaturnya BPKPD Kota Surabaya

No	Pertanyaan	Informasi
1	Meliputi apa saja pajak hotel yang ditetapkan dalam penentuan rencana PAD Kota Surabaya?	<p>Pajak Hotel dibagi menjadi dua, yaitu Hotel dan Rumah Kos.</p> <p>Pajak Hotel dikenakan tarif pajak sebesar 10%, sedangkan Pajak Rumah Kos dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Dua obyek pajak ini termasuk bagian dari pengenaan pajak dalam rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.</p>
2	Meliputi apa saja pajak restoran yang ditetapkan dalam penentuan rencana PAD Kota Surabaya?	<p>Semua Restoran yang meliputi rumah makan, warung, cafe, dan bar maupun dimakan ditempat atau dibawa pulang merupakan bagian dari pengenaan Pajak Restoran dalam rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%.</p>
3	Apa saja peraturan yang ditetapkan untuk penentuan dan pemungutan pajak hotel oleh Pemerintah Kota Surabaya?	<p>Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penentuan dan pemungutan Pajak Hotel sebagai landasan utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.2. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2009.3. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.4. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Pajak Online Sistem.
4	Apa saja peraturan yang ditetapkan untuk penentuan dan	<p>Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penentuan dan</p>

	<p>pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Surabaya?</p>	<p>pemungutan Pajak Restoran sebagai landasan utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2009. 3. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 4. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Pajak Online Sistem.
5	<p>Apa strategi pemungutan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel?</p>	<p>Strategi pemungutan Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hotel adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap pendapatan hotel, salah satunya dengan melakukan Cash Opname 2. Melakukan penungguan atau pengetukan 3. Melakukan Silent Operation dengan menjadi Intelijen didalamnya 4. Melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. <p>Pemeriksaan kantor dilakukan pada saat penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang dilihat dari adanya kenaikan atau tidak di tahun yang lalu dengan kondisi bulan yang sama.</p> <p>Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan mengaudit hotel tersebut mulai dari laporan keuangan keseluruhan sampai dengan Cash Flow perusahaan, dan</p>


		<p>seperti apa Business Plan dari perusahaan tersebut.</p> <p>5. Melakukan pengawasan (Self Assessment), yaitu seluruhnya diserahkan kepada pihak wajib pajak dengan cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaporkan sendiri b. Mencatat sendiri c. Menyetor sendiri
6	<p>Apa strategi pemungutan pajak restoran yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran?</p>	<p>Strategi pemungutan Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap pendapatan restoran, salah satunya dengan melakukan Cash Opname 2. Melakukan penungguan atau pengetukan 3. Melakukan Silent Operation dengan menjadi Intelijen didalamnya 4. Melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. <p>Pemeriksaan kantor dilakukan pada saat penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang dilihat dari adanya kenaikan atau tidak di tahun yang lalu dengan kondisi bulan yang sama.</p> <p>Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan mengaudit restoran tersebut mulai dari laporan keuangan keseluruhan sampai dengan Cash Flow perusahaan, dan seperti apa Business Plan dari perusahaan tersebut.</p>

		<p>5. Melakukan pengawasan (Self Assessment), yaitu seluruhnya diserahkan kepada pihak wajib pajak dengan cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaporkan sendiri b. Mencatat sendiri c. Menyetor sendiri
7	Adakah upaya dalam memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak hotel dan restoran di Kota Surabaya?	<p>Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kemudahan pembayaran dengan tiga cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan menggunakan online sistem melalui smartphone android 2. Pelaporan melalui E-SPTPD dengan cara upload 3. Pelaporan melalui menanamkan database ke sistem <p>Dalam hal pembayaran penyetoran Pajak Hotel dan Restoran sudah dibantu oleh 4 Bank (Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI). Untuk masalah perihal pembayaran bisa diakses 24 jam melalui ATM, Internet Banking. Semua bisa diakses dengan mudah.</p>
8	Adakah penegakan sanksi pajak dalam pemungutan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya?	<p>Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem Self Assessment dengan tahap melaporkan sendiri hingga tahap penyampaian sendiri, jadi penegakan hukum sudah sesuai UU dan PERDA. Berikut beberapa sanksi yang diterapkan dalam pemungutan pajak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi administrasi sebesar 2% maksimal selama 24 bulan 2. Sanksi kenaikan pajak sebesar 25% apabila tidak menyampaikan E-SPTPD 3. Sanksi kenaikan pajak sebesar 100% apabila dilakukan pemeriksaan adanya

		<p>data baru dan dilakukan pemeriksaan ulang serta kena sanksi pajak 100%</p> <p>Dalam hal wajib pajak sanksi sudah diterapkan, namun jika ditemukan kecurangan atau tidak melakukan pembayaran maka akan ada sistem pengawasan dengan didampingi oleh tim penegak hukum yaitu Satpol PP dengan melakukan penempelan stiker kepada wajib pajak, dalam hal penempelan stiker ini apabila masih tetap terjadi kecurangan maka dilimpahkanlah penagihan tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Surabaya.</p>
9	<p>Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penegakan sanksi pajak?</p>	<p>Belum ada kesulitan dan tidak ada masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penegakan sanksi pajak. Namun ada hambatan yaitu jika adanya wajib pajak yang belum memahami pembayaran online sistem, terutama pada restoran yang masih menggunakan cara manual dengan uang keluar masuk laci. Hal tersebut menjadi kesulitan untuk mengajari cara pemakaian android, khususnya pada pemilik restoran yang sudah usia tua atau tidak mengikuti kemajuan teknologi. Karena semua sistem sudah canggih maka diharapkan semua bisa mengakses menggunakan HP.</p>
10	<p>Apakah peraturan tentang pemungutan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan di BPKPD Pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku?</p>	<p>Peraturan tentang pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang ditetapkan di BPKPD Pemerintah Kota Surabaya sudah sesuai dengan peraturan berlaku. Berikut peraturan yang masih berlaku dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahirnya UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

		<ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU No 28 Tahun 20093. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah4. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Pajak Online Sistem. <p>Karena peraturan dibuat harus dijalankan bukan untuk dihindari.</p>
--	--	---

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi












UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus II, Sumilowati 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5925289, 081216781170 E-mail: info@untag-sb.ac.id

SEMESTER
 Gasal / Genap
 2021 / 2022


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa / NBI : Dinda Owi Apriyiah , 12212003003
 Nama Pembimbing : Dr. I. B. Kehut Bayangkara, SE., MM
 Judul Skripsi : Strategi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Mulai Program Skripsi : Semester _____ Thn. Ak. _____ Selesai Bimbingan Tanggal _____

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1.	18/Sept/2021	Judul	ACC	
2.	25/Sept/2021	Proposal	ACC	
3.	1/okt/2021	BAB I	ACC	
4.	16/okt/2021	BAB II	ACC	
5.	17/Nov/2021	BAB III	ACC	
6.	23/Nov/2021	BAB IV	Revisi	
7.	11/Des/2021	BAB IV	Revisi	
8.	17/Des/2021	BAB IV, V	BAB. IV ACC + V Revisi	
9.	25/Des/2021	BAB V	Revisi	
10.	26/Des/2021	BAB V	ACC	

Perpanjangan I _____
 Semester _____
 Th. Ak. _____
 Cetak/Revisi _____

Surabaya, 29 Desember 2021

 Dr. I. B. Kehut Bayangkara, SE., MM., Ak.
 (Nama dan tanda tangan Pembimbing)

Lampiran 3 Uji Turnitin

STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

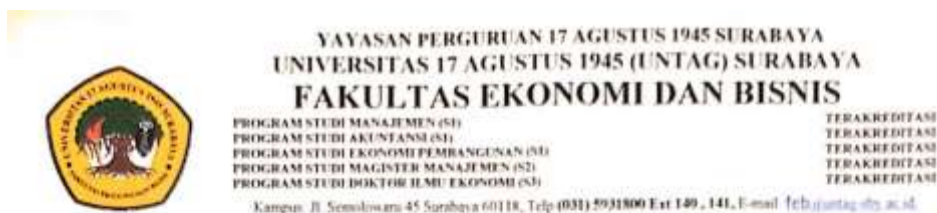
ORIGINALITY REPORT

20%	20%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	9%
2	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.stiebankbpdjateng.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	www.slideshare.net Internet Source	1%
8	jdi.h.ternatekota.go.id Internet Source	1%

Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Mengadakan Penelitian



Nomor : 1679/K/FEB/IX/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Ijin Untuk Mengadakan Penelitian**
 Kepada : Yth. Bapak/Ibu Pimpinan KEPALA BAKESBANGPOL dan LINMAS Kota Surabaya
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 Ketabang, Kec. Genteng Surabaya

Dengan hormat,

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : Dinda Dwi Apriliyah
 N. P. M : 1221800095
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
 Alamat : Jl. Bratang Gede 6 1 No. 39 Surabaya
 Telp./Hp. 088234101194

Guna melakukan penelitian pada :

BPKPD KOTA SURABAYA

untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya dengan judul "STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PADA BPKPD KOTA SURABAYA)"

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 20 September 2021



Dinda Dwi Apriliyah, MSi., Ak. CA
 NPP. 20220.93.0319

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Surabaya 60272
 Telepon (031) 5343000, (031) 5312144 Pesawat 112

Surabaya, 01 Oktober 2021

Nomor : 070/14442/436.8.5/2021
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
 Pajak Daerah Kota Surabaya
 di -
 SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor 1679/K/FEB/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 Perihal Permohonan Ijin untuk Mengadakan Penelitian
- Pit. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :
- Nama : Dinda Dwi Apriliyah
 - Alamat : Jl. Perintis 6/61 Surabaya
 - Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 - Instansi/Organisasi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 - Kewarganegaraan : Indonesia
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- Judul/ Tema : Strategi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Surabaya
 - Tujuan : Penelitian
 - Bidang Penelitian : Akuntansi Manajemen Sektor Publik
 - Penanggung Jawab : Dr. I. B. Ketut Bayangkara, SE., MM., Ak., CA., CMA., CSRA., CSP
 - Anggota Peserta :
 - Waktu : 2 (Dua) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan.
 - Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya
- Dengan persyaratan :
- Dalam masa pandemi Covid-19, pelaksanaan Penelitian wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020.
 - Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan asesment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat.
 - Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomer 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah.
 - Peserta Penelitian wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan Penelitian.
 - Peserta Penelitian OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder.
 - Pelaksanaan Penelitian tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, distegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
 - Pelaksanaan Penelitian harap tidak membebani atau memberatkan warga.

8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya.

9. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



Dapatkan scan barcode diatas untuk mengetahui validitas surat.

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya
2. Saudara yang bersangkutan.

Pt. KEPALA BADAN



Irvan Widyanto, AMP., S.Sos., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690715 199003 1 011